



Media: Republika

Hari: Sabtu

Tanggal: 17 Juli 2021

Halaman: 5

Jagal Diminta Bawa Surat Bebas Covid-19

Jumlah personel untuk tiap pekerjaan pun diusahakan terbatas.

■ SILVY DIAN SETIAWAN,
FERNAN RAHADI

YOGYAKARTA – Sejumlah rambu-rambu dan aturan yang lebih ketat dalam penyelenggaraan ibadah Idul Adha dikeluarkan Pemerintah Kota Yogyakarta untuk mencegah penularan Covid-19, termasuk meminta jagal penyembelihan hewan kurban berasal dari luar daerah untuk membawa surat bebas Covid-19. "Jika petugas penyembelihan hewan kurban atau jagal berasal dari luar daerah, maka kami minta agar mereka pun membawa surat bebas Covid-19 yang masih berlaku. Bisa hasil negatif antigen atau swab (usap) PCR," kata Kepala Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta Suyana di Yogyakarta, Jumat (16/7).

Pada Idul Adha tahun ini, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengeluarkan panduan yang tertuang melalui Surat Edaran Wali Kota Yogyakarta Nomor 451/3582/SE/2021 yang berisi berbagai aturan mulai dari pelaksanaan takbir, Shalat Idul Adha, penjualan hewan kurban, hingga penyembelihan, dan distribusi daging.

Di dalam surat tersebut juga ditetapkan waktu pelaksanaan penyembelihan hewan kurban yang dibatasi hanya tiga hari tasyrik yaitu pada 21-23 Juli dan tidak ada penyembelihan yang dilakukan bertepatan dengan Idul Adha seperti tahun sebelumnya.

Selain di Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Giwang, penyembelihan hewan kurban tetap bisa dilakukan secara mandiri oleh masyarakat dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat dan disiplin. "Hingga saat ini sudah ada 179 lokasi penyembelihan hewan kurban yang sudah menyampaikan pemberitahuan ke kami dengan total 750 ekor sapi, 2.320 kambing, dan 1.769 domba," kata Suyana dalam konferensi pers yang digelar secara virtual, Jumat (16/7).

Setiap lokasi penyembelihan hewan kurban di masyarakat wajib menyampaikan pemberitahuan ke Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta untuk kemudian diteruskan ke kecamatan dan Satgas Covid-19 di masing-masing kecamatan. "Yang harus diperhatikan saat penyembelihan hewan kurban di masyarakat adalah alur pekerjaan mulai dari penyembelihan, pengulitan hingga pembagian daging. Semuanya harus runtut dan patuh protokol kesehatan," katanya.

Jumlah personel untuk tiap pekerjaan pun diusahakan terbatas. Jumlah yang disarankan adalah empat orang untuk penyembelihan, tiga orang untuk pengulitan, dan empat orang untuk pembagian daging. "Petugas hanya bertugas di satu tugas saja. Tidak boleh saling membantu supaya tidak ada kerumunan," katanya.

Suyana berharap, setiap panitia penyembelihan hewan kurban memberikan penanda atau papan informasi yang menyatakan bahwa masyarakat tidak diperkenankan mendekat atau berkerumun di lokasi penyembelihan. "Biasanya, dalam proses penyembelihan hewan kurban ini banyak melibatkan masyarakat. Tetapi untuk saat ini lebih baik dikerjakan dalam tim yang terbatas tetapi profesional karena kondisinya memang berbeda," katanya.

Jika dalam satu lokasi ada banyak hewan kurban yang harus disembelih maka disarankan untuk memperbanyak lokasi penyembelihan agar tidak terjadi kerumunan. Dinas Pertanian dan Pangan Kota Yogyakarta juga menyiapkan dua nomor telepon, yaitu 081215336059 dan 087728747339 sebagai hotline

apabila ada masyarakat atau panitia penyembelihan hewan kurban yang mengalami kesulitan. "Misalnya ada hewan yang tiba-tiba sakit, maka tim akan diterjunkan ke lapangan untuk mengecek," katanya.

Sementara itu, kapasitas Rumah Pemotongan Hewan (RPH) Giwang, Kota Yogyakarta terbatas. Suyana mengatakan, kapasitas RPH Giwang hanya dapat menampung 75 hewan kurban. Sehingga, banyak panitia kurban yang mengajukan pemotongan hewan kurban di luar RPH. "Kalau bisa masyarakat memotong hewan kurban di RPH, tapi kapasitas (tidak terbatas) kira-kira 75 hewan," kata Suyana.

Terkait dengan pendistribusian daging kurban, nantinya tidak akan diambil oleh warga. Namun, akan ada petugas dari panitia penyelenggaraan kurban yang akan mengantarkan ke rumah warga. Hal ini dilakukan untuk menjaga agar tidak terjadi kerumunan di lokasi pemotongan hewan kurban. Sehingga, diharapkan tidak menimbulkan klaster baru penularan Covid-19.

"Saya sarankan ke panitia untuk membuat spanduk berisi permohonan tidak mendekat saat ada kegiatan pemotongan agar tidak terjadi kerumunan, perkembangan (Covid-19) di Yogyakarta itu luar biasa. Jangan sampai terjadi kerumunan," jelasnya. ■ ed: fernan rahadi

Instansi	
1.	☐ Positif
2.	☐ Netral
3.	
4.	
5.	

Tindak Lanjut
Ditanggapi
Diketahui
Pers

Instansi	Nilai Berita	Sifat	Tindak Lanjut
1. Dinas Kesehatan	Netral	Biasa	Untuk Diketahui
2. Dinas Pertanian dan Pangan			

Yogyakarta, 08 Agustus 2026
Kepala

Ig. Trihastono, S.Sos. MM
NIP. 19690723 199603 1 005